

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk cukup besar. Hal itu terbukti dari jumlah penduduk Indonesia mencapai kurang lebih 278.696,2 ribu jiwa pada tahun 2023 menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (Indonesia, 2022). Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat mempengaruhi pembangunan infrastruktur. Hal ini disebabkan masyarakat tidak terlepas dari sarana dan prasarana untuk menunjang segala aktivitasnya. Semakin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin banyak juga infrastruktur yang harus disediakan oleh Pemerintah sebagai bentuk dukungan mobilisasi penduduk dan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pelayanan publik. Transportasi sebagai salah satu bentuk dukungan dalam mobilitas penduduk memiliki peranan penting untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumber daya lainnya guna menunjang pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Permasalahan-permasalahan di setiap kota timbul sejalan bersamaan dengan proses pertumbuhan serta perkembangan kota tersebut.

Pertumbuhan penduduk di Provinsi Jambi setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah penduduk di Provinsi Jambi tahun 2020 sejumlah 3.548,2 ribu jiwa dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 yakni menjadi 3.631,1 ribu jiwa (BPS Jambi, 2021). Jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Jambi terletak pada Kota Jambi. Kota Jambi merupakan sebuah kota sekaligus Ibu Kota dari Provinsi Jambi. Kota ini

menjadi salah satu daerah yang berkembang pesat dengan peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya.

Pada tahun 2020 tercatat penduduk Kota Jambi berjumlah 606,2 juta jiwa dan terus meningkat sampai pada tahun 2023 dengan jumlah 627,8 juta jiwa (BPS Jambi, 2021). Sejalan dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, tentunya jumlah kendaraan pribadi masyarakat Kota Jambi pun ikut meningkat.

Tabel 1.1
Data jumlah kendaraan pribadi di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Kerinci	70.790	78.396	88.733
2.	Merangin	225.586	244.300	267.690
3.	Sarolangun	173.212	185.551	199.860
4.	Batanghari	144.839	157.575	174.516
5.	Muaro Jambi	21.398	39.922	71.109
6.	Tanjung Jabung Timur	46.389	54.707	66.245
7.	Tanjung Jabung Barat	134.503	149.549	167.832
8.	Tebo	43.700	62.766	83.219
9.	Bungo	39.547	61.533	84.867
10.	Kota Jambi	556.859	655.057	901.118
11.	Kota Sungai Penuh	6.486	8.803	10.765

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat paling banyak yakni terletak di Kota Jambi, pada tahun 2021 tercatat kendaraan di Kota Jambi dengan jumlah 556.859 kendaraan dan terus meningkat setiap tahunnya sampai pada tahun 2023 dengan jumlah 901.118 kendaraan (Prima, 2023). Bertambahnya jumlah kendaraan tersebut menuntut Pemerintah Daerah selaku penyelenggara pelayanan publik untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam mengatur arus

kendaraan serta dapat memberikan jasa layanan parkir memadai kepada masyarakat.

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Jambi memiliki wewenang dalam pengelolaan parkir. Dinas Perhubungan Kota Jambi memiliki tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan, salah satunya di bidang lalu lintas dan perparkiran. Tugas dan Fungsi Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota Jambi yakni (Dishub Kota Jambi, 2017):

- 1) Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengelola parkir;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan parkir;
- 3) Pembinaan dan pengembangan di bidang pengelola parkir;
- 4) Penertiban dan pengamanan di bidang pengelola parkir;
- 5) Pengkoordinasian hubungan kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas di bidang pengelola parkir;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- 7) Serta, melakukan pembinaan dan pengawasan dalam bentuk penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui sosialisasi, pendidikan dan pelatihan kepada juru parkir, penegakan disiplin kepada petugas parkir, mengawasi petugas parkir di lapangan, mengawasi ketertiban kendaraan yang parkir dan mengawasi penyeteroran retribusi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Menurut Perda Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum menjelaskan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya (Perda Kota Jambi, 2010). Pemerintah Kota Jambi memberikan fasilitas sarana dan prasarana parkir guna meningkatkan pelayanan parkir yang memadai kepada masyarakat, salah satunya yaitu disediakannya lokasi parkir atau area yang digunakan untuk melakukan operasi perparkiran. Area lokasi parkir tersebut dibagi menjadi dua yakni titik parkir di dalam kawasan dan titik parkir di luar kawasan.

Tabel 1.2
Data Titik Parkir Yang Tertata di Kota Jambi

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Titik Parkir dalam Kawasan	1	1	1	1	1
2.	Titik Parkir Luar Kawasan	534	815	464	498	654

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Jambi

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Jambi, terdapat satu titik parkir di dalam kawasan Kota Jambi dan beberapa titik lokasi parkir di luar kawasan yakni terletak di badan jalan dan lokasi parkir yang disediakan oleh badan usaha. Lokasi parkir tersebut merupakan titik lokasi parkir terdata di Dinas Perhubungan Kota Jambi atau merupakan titik parkir resmi.

Keamanan terhadap kendaraan di setiap titik lokasi parkir menjadi tanggung jawab dari juru parkir, juru parkir atau petugas parkir merupakan orang yang bekerja membantu mengatur kendaraan keluar masuk tempat parkir, mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada

saat akan keluar dari ruang parkir. Kepala Bidang Pengelola Parkir Dinas Perhubungan menetapkan atau menugaskan juru parkir dengan surat tugas dan dilengkapi dengan atribut seperti rompi, topi dan id card. Mengenai karcis parkir, dilansir dari Tribun Jambi, tarif retribusi parkir di Kota Jambi mengalami kenaikan sejak Januari 2024, untuk kendaraan roda dua naik dari Rp 1.000 menjadi Rp 2000 dan untuk kendaraan roda empat naik dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.000 (Rinaldi, 2024). Retribusi parkir ini berpotensi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Selain titik yang telah didata oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi masih banyak ditemukan sejumlah titik parkir liar. Dikutip dari imcnews, pada akhir tahun 2023 masih terdapat banyak juru parkir ilegal dan juru parkir nakal di Kota Jambi (IMCNEWS.COM, 2023). Maraknya parkir liar membuat Dinas Perhubungan Kota Jambi kembali mendapati aktivitas para pelaku oknum juru parkir liar yang terjadi di beberapa kawasan Kota Jambi. Juru parkir liar tersebut terjaring dalam Razia penertiban terhadap pengawasan dalam perparkiran ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023 lalu. Menurut Bidang Parkir Dinas Perhubungan menjelaskan bahwa para juru parkir liar ini didapatkan dalam keadaan sedang melakukan aktivitas di sejumlah ruas jalan maupun tepi jalan di kawasan Kota Jambi.

Salah satu kawasan di Kota Jambi yang kerap terjadi aksi juru parkir liar adalah di sekitaran kawasan pasar. Banyak masyarakat mengeluhkan hal tersebut, pasalnya dalam kawasan pasar masih terjadi pungutan uang oleh juru parkir liar. Para juru parkir liar tersebut tidak mengenakan rompi maupun seragam dari Dinas Perhubungan dan tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna parkir. Dilansir

dari artikel Jambi Ekspres, komisi II DPRD Kota Jambi (Junedi Singarimbun) mengatakan bahwa pungutan di dalam kawasan pasar Kota Jambi seharusnya tidak boleh dilakukan karena masalah pengaturan parkir di dalam kawasan pasar itu sudah menjadi tanggung jawab dari Dinas Perhubungan (M Hafizh Alatas, 2024).

Selain di kawasan pasar, aksi juru parkir liar juga terjadi di beberapa kawasan di Kota Jambi, seperti di Jalan RE Martadinata, kawasan tugu kris signjai dan kawasan lainnya yang menjadi pusat keramaian. Dikutip dari Artikel Jambiberita.com, menyebutkan bahwa petugas Dinas Perhubungan Kota Jambi mengamankan enam orang juru parkir liar yang melakukan pemungutan, diantaranya yaitu: (1) Kalimatus Sukaimi, Kecamatan Alam Barajo; (2) Nanda, Pasar Simpang Pule RT 27; (3) Yusuf, Jalan Arjuna Jelutung; (4) Sayid Umar, Kec. Pasar Jambi; (5) Jasmen Simatupang, Jerambah Bolong; (6) M. Syafei (Jambiberita.com, 2021).

Permasalahan aksi juru parkir liar ini disebabkan karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Pengawasan dari Dinas Perhubungan Kota Jambi belum maksimal dikarenakan jumlah pengawas kurang dari segi kuantitas. Berdasarkan data dari penelitian terdahulu, tepatnya dari penelitian Mariyon Holid dan Netty menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan Kota Jambi sendiri memiliki jumlah pengawas yakni 11 orang untuk mengawasi 105 titik parkir (Holid et al., 2020). Jumlah pengawas tersebut secara kuantitas masih belum sebanding dengan jumlah titik parkir dan Juru Parkir yang harus diawasi setiap harinya. Selain disebabkan oleh kurangnya jumlah pengawas, penulis juga menduga bahwa pengawasan Dinas Perhubungan Kota Jambi tidak dilakukan

secara konsisten. Pada artikel yang dipublish oleh Dinamika Jambi.com dijelaskan bahwa efektivitas pengelolaan parkir di Kota Jambi perlu menjadi perhatian, penataan parkir tidak teratur dan maraknya parkir liar mengindikasikan kurangnya pengawasan dan manajemen yang baik dari pihak berwenang (Sindi Adaliya, 2024).

Dampak dari adanya juru parkir liar di Kota Jambi yaitu dapat mengganggu aktivitas dan ketertiban lalu lintas di jalan, ketidaknyamanan dan keresahan masyarakat, kerugian bagi pemilik usaha dan dapat memberikan kerugian bagi pendapatan daerah Kota Jambi, karena juru parkir liar tidak menyetorkan pendapatannya kepada Pemerintah, sehingga Pemerintah kehilangan potensi pendapatan dari sektor parkir. Retribusi dari sektor parkir merupakan salah satu penyumbang terbesar PAD Kota Jambi. Pemanfaatan dari retribusi parkir seharusnya mampu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga secara efisien dapat memperbaiki sarana dan prasarana kota, khususnya untuk perbaikan fasilitas parkir sehingga akan meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan parkir.

Tabel 1.3
Data Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Jambi Tahun 2021-2023

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Target Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Jambi	Rp 6.255.000.000	Rp 6.225.000.000	Rp 6.350.000.000
2.	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Jambi	Rp 5.224.348.000	Rp 5.174.983.000	Rp 4.727.373.000

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan data dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, penerimaan retribusi dari sektor parkir pada tahun 2021 sampai 2023 tidak memenuhi target. Target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu 6 miliar dan hanya terealisasi sekitar 5 miliar. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih konsisten dari Dinas Perhubungan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pelayanan parkir.

Pada penelitian ini, peneliti mencantumkan tiga penelitian terdahulu yang memiliki topik berkaitan dan relevan dengan topik yang diteliti. Penelitian terdahulu pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Roiyan Fadilah dkk dengan judul “Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh Terhadap Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum” (Muhammad Roiyan Fadilah, Wais Alqarni & Rasanjani, 2022) Penelitian ini menggunakan teori pengawasan oleh Robbins dan Coulter dalam Satriadi. Berdasarkan temuan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh berkonsentrasi untuk mengurangi jumlah juru parkir tidak resmi dan melakukan pembinaan secara rutin terhadap juru parkir di wilayah Kota Banda Aceh. Meskipun demikian, masih terdapat juru parkir yang memungut tarif tidak sesuai dengan peraturan berlaku karena tidak adanya pengawasan terhadap pemungutan retribusi parkir. Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menghadapi enam tantangan dalam pengawasan retribusi layanan parkir, yaitu: kurangnya bukti pelanggaran, sedikitnya pengaduan masyarakat, jumlah juru parkir dan titik parkir yang banyak, kurangnya sumber daya petugas pengawasan, rendahnya pemahaman juru parkir dan kurangnya penggunaan karcis parkir.

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu oleh Ulfa Aprilia dan Diah Ayu Pratiwi dengan judul “Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Batam Pada Pungutan Parkir Liar di Jembatan Fisabilillah dan Jembatan Narasinga Barelang Tahun 2019” (Ulfa Aprilia, 2021). Penelitian ini menggunakan teori efektivitas William N. Dunn dengan menggunakan indikator efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Temuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Dinas Perhubungan Kota Batam bukanlah satu-satunya organisasi yang mengawasi parkir liar. Menurut surat keputusan tim terpadu pengawasan parkir liar, TNI dan Polri juga terlibat dalam pengawasan parkir liar di Kota Batam. Tim terpadu ini memantau jembatan Fisabilillah dan Narasinga di Barelang dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran parkir. Parkir secara ilegal dilarang oleh hukum, diperlukan adanya pemantauan yang efektif terhadap parkir liar di jembatan Fisabilillah dan Narasinga di Barelang.

Penelitian terdahulu ketiga yakni oleh Mariyon Holid, dkk dengan judul “Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Retribusi Parkir di Kota Jambi” (Holid et al., 2020). Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap retribusi parkir di Kota Jambi oleh Dinas Perhubungan belum berjalan dengan optimal. Penelitian mengungkapkan bahwa jumlah petugas pengawas yang ada masih sangat minim dibandingkan dengan banyaknya lokasi titik parkir yang tersebar di wilayah kota, sehingga menyebabkan banyak pelanggaran yang tidak terawasi. Banyak juru parkir yang beroperasi secara ilegal, memperlmainkan tarif, dan tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna jasa yang berakibat pada kebocoran pendapatan retribusi yang seharusnya masuk ke Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Selain itu, pencapaian PAD dari sektor parkir hingga awal September 2019 baru mencapai 59% dari target yang ditetapkan, menandakan adanya masalah serius dalam pengelolaan dan pengawasan retribusi parkir.

Ketiga penelitian diatas membuktikan bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan belum pernah diteliti sebelumnya. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah memiliki kesamaan topik yakni tentang juru parkir liar, oleh sebab itu peneliti ingin memperkuat kajian terkait penelitian ini. Sedangkan yang membedakan dari kelima penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terletak pada lokasi penelitian berbeda dan penulis lebih memfokuskan kajian terkait konsistensi pengawasan Dinas Perhubungan terhadap juru parkir liar di Kota Jambi guna mengatasi dan menanggulangi maraknya permasalahan juru parkir liar.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti akan mengkaji lebih dalam terkait **“KONSISTENSI DINAS PERHUBUNGAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP JURU PARKIR LIAR DI KOTA JAMBI TAHUN 2024”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsistensi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi terhadap juru parkir liar?
2. Bagaimana upaya meningkatkan konsistensi agar pengawasan terhadap juru parkir liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi lebih efektif?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konsistensi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi terhadap Juru Parkir Liar.
2. Untuk mengetahui upaya meningkatkan konsistensi agar pengawasan terhadap Juru Parkir Liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi lebih efektif.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pikiran bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan khususnya dalam bidang pengawasan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Dinas Perhubungan Kota Jambi dalam meningkatkan konsistensi untuk melakukan pengawasan terhadap juru parkir liar dan meningkatkan pengetahuan bagi peneliti serta masyarakat.

3. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan literatur atau bahan kajian dalam studi Ilmu Pemerintahan dan sebagai bahan informasi ilmiah bagi peneliti yang ingin mengetahui konsistensi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap juru parkir liar.

1.5. Landasan Teori

Landasan teori adalah kumpulan definisi, konsep dan pernyataan mengenai variabel-variabel dalam sebuah penelitian yang telah disusun secara cermat dan metodis. Kerangka teori ini berfungsi sebagai landasan kokoh bagi penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, membuat landasan teori untuk sebuah penelitian sangatlah penting karena akan menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya.

1.5.1. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk mengamati dan menilai apakah suatu program dilaksanakan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Menurut Ndraha dalam buku Rahmawati Sururama, pengawasan bukan hanya memantau jalannya program, tetapi juga membandingkan hasil capaian dengan rencana, mengevaluasi efektivitas dan efisiensinya, serta mengambil tindakan jika diperlukan (Sururama & Amalia, 2020). Tindakan ini dapat berupa pencegahan, pendidikan, koreksi, atau bahkan penindakan jika ditemukan penyimpangan. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar pemerintahan. Tujuan utama pengawasan adalah untuk memastikan bahwa Pemerintah bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan mengelola sumber daya secara efektif dan akuntabel. Pengawasan internal dilakukan oleh anggota Pemerintahan itu sendiri, seperti atasan terhadap bawahan. Pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak luar, seperti masyarakat, media, atau lembaga independen.

Mc. Farland dalam buku Rahmawati Sururama memberikan pengertian dari pengawasan (*control*) sebagai berikut: “*Control is the process by which an*

executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies” (Sururama & Amalia, 2020). Artinya pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijakan yang telah ditentukan. Pandangan para ahli diatas menunjukkan bahwa pengawasan adalah untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, konflik, dan ketidakberesan serta bertentangan dengan tujuan otoritas yang telah ditetapkan.

George R. Terry dalam buku Rahmawati Sururama menjelaskan bahwa pengawasan bukan hanya tentang memantau, tetapi juga tentang menilai pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Sururama & Amalia, 2020). Penilaian ini dilakukan dengan mengevaluasi prestasi kerja, jika ditemukan penyimpangan dari rencana maka perlu diambil tindakan korektif untuk memperbaikinya. Admosudirdjo dalam buku Rahmawati Sururama mengatakan pada dasarnya pengawasan adalah kumpulan tindakan dengan menilai atau membandingkan apa yang sedang dilakukan atau telah dilakukan sehubungan dengan standar, norma, rencana atau kriteria penetapan sebelumnya (Sururama & Amalia, 2020). Sedangkan siagian dalam buku Rahmawati Sururama berpendapat bahwa pengawasan adalah proses mengamati pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya (Sururama & Amalia, 2020).

Beberapa tujuan dari pengawasan menurut Arifin Abdul Rachman dalam buku Rahmawati Sururama adalah sebagai berikut (Sururama & Amalia, 2020):

- a) Untuk menentukan apakah semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- b) Untuk menentukan apakah segala sesuatu telah beroperasi sesuai dengan pedoman dan instruksi
- c) Untuk mengidentifikasi kekurangan, tantangan dan kegagalan sehingga penyesuaian dapat dilakukan untuk meningkatkan dan menghentikan pengulangan kegiatan yang salah
- d) Untuk menentukan apakah semuanya berjalan seefisien mungkin dan apakah ada kemajuan lebih lanjut yang dapat dilakukan untuk mendapatkan efisiensi lebih tinggi.

1.5.2. Konsep Tata Kelola Parkir

Menurut Nugroho dalam Jurnal Ajeng Retno, Pengelolaan adalah istilah yang digunakan dalam bidang manajemen. Secara etimologis, kata ini berasal dari "kelola" (*to manage*) dan umumnya mengacu pada proses mengatur atau menangani sesuatu guna mencapai tujuan tertentu (Widyastuti et al., 2018). Menurut Terry dalam Jurnal Ajeng Retno, Pengelolaan memiliki makna yang sama dengan manajemen, sehingga dipahami sebagai suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Proses ini memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Syaiful dalam Jurnal Ajeng Retno Parkir merupakan kondisi di mana suatu kendaraan berhenti sementara dan tidak bergerak karena ditinggalkan oleh pengemudinya. Dalam pengertian parkir juga termasuk setiap kendaraan yang

berhenti di lokasi tertentu, baik yang telah ditetapkan dengan rambu lalu lintas maupun tidak, serta tidak hanya bertujuan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang maupun barang (Widyastuti et al., 2018).

Pengelolaan parkir diatur melalui Peraturan Daerah guna memiliki landasan hukum yang jelas, serta diwujudkan dalam bentuk rambu larangan, rambu petunjuk, dan informasi. Guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dan penyelenggara terhadap kebijakan pengendalian parkir, diperlukan langkah tegas dalam menindak pelanggar. Regulasi mengenai parkir di Kota Jambi didasarkan pada Perda Kota Jambi No. 3 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Perwali Kota Jambi No. 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Jambi.

1.5.3. Teori Konsistensi

Konsistensi (*consistency*) merupakan kesamaan pemahaman dan kesepakatan para anggotanya terhadap pondasi fundamental dan nilai-nilai pada organisasi (Isnada, 2019). Konsep konsistensi berkaitan dengan seperangkat keyakinan, nilai dan simbol yang dimiliki dan dipahami bersama diantara para anggota organisasi serta pelaksanaan kolaboratif dari perencanaan operasi. Adanya konsistensi dalam sebuah organisasi ditandai dengan adanya kejelasan nilai-nilai, staf merasa terikat dan batas-batas tindakan terarah, konsistensi ini bagaikan pilar penyangga untuk memperkuat dan menstabilkan organisasi (Isnada, 2019).

Consistency mengacu pada seberapa teguh mereka mengikuti norma atau peraturan yang berlaku. Denison dalam jurnal isnada mengemukakan bahwa konsistensi dihubungkan dengan tingkat keyakinan nilai-nilai, harapan serta

dilakukan secara konsisten oleh staf organisasi (Isnada, 2019). Menurut Robbins dalam jurnal Jonson Rajagukguk dkk menjelaskan bahwa konsistensi adalah kemampuan setiap orang untuk mengoordinasikan tindakan dan sikap mereka dengan cara yang masuk akal dan konsisten (Rajagukguk et al., 2024). Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa konsistensi merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi. Konsistensi tidak hanya melibatkan tindakan yang dilakukan, tetapi juga menyangkut nilai-nilai yang diyakini dan sikap yang ditunjukkan oleh setiap anggota organisasi.

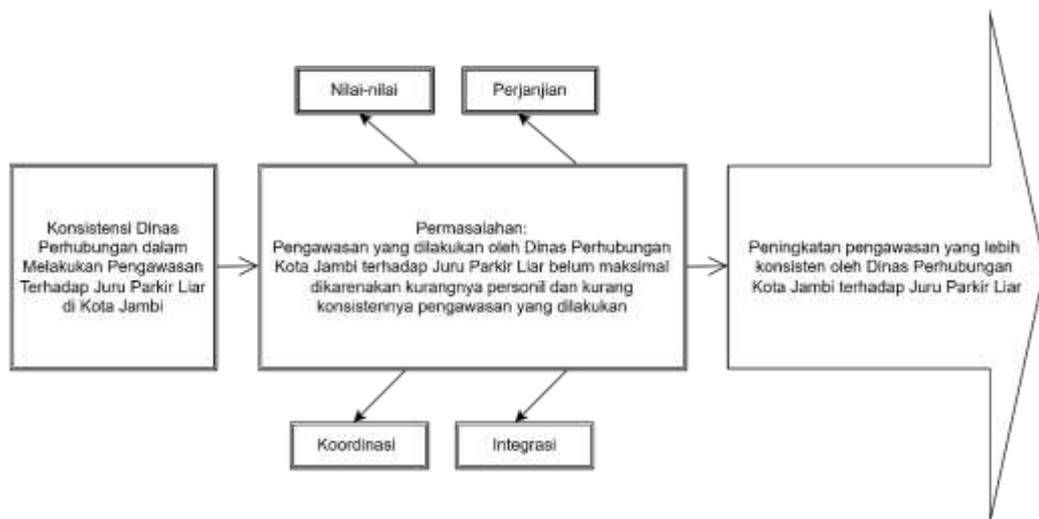
Menurut Daniel R. Denison, konsistensi terdiri dari tiga indikator yaitu (Daniel R Denison, Stephanie Haaland, 2002):

- 1) Nilai-nilai (*core value*) yakni prinsip dasar dan keyakinan yang dimiliki dan dijalankan oleh organisasi. Nilai-nilai ini menjadi panduan perilaku individu dan kolektif dalam organisasi dan harus dipahami serta diinternalisasi oleh seluruh anggota agar tercipta konsistensi pengawasan yang kuat. Pada konteks pengawasan terhadap juru parkir liar, Dinas Perhubungan Kota Jambi harus memiliki nilai-nilai. Nilai-nilai ini membantu memastikan bahwa pengawasan dilakukan secara adil, konsisten, dan berlandaskan etika profesional, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dinas.
- 2) Perjanjian (*agreement*) merupakan kesepakatan atau komitmen bersama antara anggota organisasi tentang tujuan, strategi dan cara-cara untuk mencapainya. Perjanjian yang kuat akan menciptakan sinergi dan keselarasan antara anggota organisasi dalam mencapai hasil

yang diinginkan. Dinas Perhubungan membuat kesepakatan internal terkait standar operasi, prosedur penanganan pelanggaran, dan kebijakan pengawasan. Contohnya, menyepakati SOP dalam melakukan patroli, sistem pelaporan pelanggaran, dan prosedur penindakan. Kesepakatan ini mendorong pelaksanaan pengawasan yang seragam dan konsisten di seluruh bagian organisasi.

- 3) Koordinasi dan Integrasi (*coordination and integration*) adalah kemampuan organisasi untuk menyelaraskan berbagai bagian atau unit agar dapat bekerja secara efektif sebagai satu kesatuan. Organisasi yang baik memiliki mekanisme koordinasi yang jelas antar bagian, sehingga setiap individu atau kelompok dapat bekerja dengan tujuan yang sama.

1.6. Kerangka Berpikir



Kerangka teori Fishbone digunakan dalam penelitian ini karena mampu mengidentifikasi berbagai faktor penyebab yang memengaruhi konsistensi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap juru parkir liar di Kota Jambi. Selain itu, model ini juga memberikan gambaran visual yang jelas, sehingga

mempermudah analisis serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penggunaan kerangka teori Fishbone dalam penelitian ini dapat membantu menghasilkan solusi yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap parkir liar di Kota Jambi.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan atau kegunaan tertentu lainnya. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif didefinisikan oleh Creswell, J. W. dalam buku Feny sebagai penelitian dengan melihat masalah-masalah sosial dan manusia (Fiantika, 2022). Peneliti akan memberikan deskripsi mendalam tentang temuan penelitian dalam laporan penelitian dan akan didasarkan pada laporan tampilan data serta analisis data yang dikumpulkan di lapangan. Moleong dalam buku Feny mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena tentang pengalaman subjek penelitian, misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara komprehensif dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Fiantika, 2022).

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, analisis data diperoleh (berupa kata-kata, gambar atau perilaku) dan tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dengan memberikan penjelasan

atau penggambaran mengenai situasi atau kondisi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Alasan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena untuk memperoleh gambaran lapangan dan akan dideskripsikan dalam bentuk narasi. Selain itu, Peneliti memilih metode kualitatif karena ingin mendapatkan informasi yang mendalam dan alami dari suatu situasi atau tempat tertentu. Melalui metode ini, peneliti bisa langsung berinteraksi dengan orang-orang yang terlibat, misalnya melalui wawancara atau observasi. Tujuannya adalah untuk memahami perspektif mereka secara langsung, bukan hanya berdasarkan anggapan peneliti.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian yaitu Dinas Perhubungan Kota Jambi, lokasi tersebut dipilih karena pengawasan juru parkir liar merupakan bagian dari tugas Dinas Perhubungan Kota Jambi.

1.7.3. Fokus Penelitian

Agar peneliti bisa lebih memahami penelitian yang dilakukan dan dapat mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini akan berfokus pada bagaimana konsistensi dinas perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap juru parkir liar di Kota Jambi.

1.7.4. Sumber Data

Sumber data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Dalam penelitian ini, sumber data pada penelitian ini ada dua yakni:

1. Data Primer

Data primer menurut Hasan adalah data diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang bersangkutan yang memerlukannya (Syafnidawaty, 2020). Data primer didapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara oleh peneliti. Pada penelitian ini, sumber data primer yang digunakan yakni wawancara dan observasi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber sebelumnya oleh para peneliti. Informasi ini digunakan untuk mendukung data primer yang dapat ditemukan disumber-sumber seperti buku, literatur, sumber perpustakaan dan studi sebelumnya (Syafnidawaty, 2020). Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen berkaitan dengan Parkir.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini, peneliti menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *Purposive sampling* merupakan salah satu jenis teknik pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian ilmiah. Oleh sebab itu, informan dalam penelitian ini adalah orang-orang sesuai dengan kriteria yang telah peneliti tetapkan. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball Sampling* adalah informasi dari informan pertama digunakan untuk memilih informan kedua dan rekomendasi dari informan kedua digunakan untuk memilih informan ketiga dan seterusnya (Heryana, 2018). Teknik ini bekerja

dengan sangat baik ketika diterapkan pada wawancara mendalam. Adapun informan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu:

1. Kepala Seksi Analisa dan Penataan Parkir Dinas Perhubungan Kota Jambi, Kepala Seksi Analisis dan Penataan Parkir menjadi informan utama karena perannya yang strategis dalam mengelola dan mengevaluasi sistem parkir, memahami regulasi, dan menyusun strategi pengawasan. Wawasan yang diberikan akan membantu peneliti mendapatkan data yang komprehensif dan relevan untuk menjawab fokus penelitian tentang konsistensi Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap juru parkir liar di Kota Jambi.
2. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, dipilih sebagai informan karena perannya dalam penegakan Perda, pengendalian lapangan, koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan pelaksanaan kebijakan penindakan. Informasi yang diberikan dapat memperkaya penelitian dengan data mengenai efektivitas kerja sama dan konsistensi pengawasan terhadap juru parkir liar di Kota Jambi.
3. Wakil Kepala Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi, Alasan peneliti memilih Wakil Kepala Kepolisian Sektor Pasar Kota Jambi sebagai informan karena dalam melakukan pengawasan terhadap juru parkir liar Dinas Perhubungan bekerja sama dengan kepolisian.
4. Kepala Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Mal Administrasi Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jambi, Kepala Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Mal Administrasi Ombudsman RI Perwakilan

Provinsi Jambi menjadi informan yang relevan karena perannya dalam pengawasan administrasi publik, penanganan keluhan masyarakat, pemantauan kebijakan, dan evaluasi implementasi program. Informasi yang diberikan akan memberikan perspektif objektif mengenai konsistensi dan kualitas pengawasan Dinas Perhubungan terhadap juru parkir liar di Kota Jambi, serta apakah kebijakan yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik.

5. Juru Parkir Liar, karena merupakan individu yang memiliki peran penting dalam kegiatan parkir liar.
6. Masyarakat, karena masyarakat merupakan pihak yang menerima layanan parkir.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam menganalisis masalah, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah pemantauan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang muncul pada subjek penelitian. Pada hakikatnya, kegiatan observasi adalah proses pengambilan data melalui penggunaan panca indera. Pada subjek penelitian dilakukan pengamatan dan pencatatan mengenai perilaku alamiah, dinamika yang dapat diamati, deskripsi perilaku sesuai dengan konteks saat ini dan topik-topik lainnya (Fiantika, 2022).

2. Wawancara

Wawancara adalah sesi tanya jawab dilakukan antara dua orang untuk berbagi informasi dan dapat diinterpretasikan berkaitan dengan suatu topik tertentu. Sebaliknya, menurut Zuriah dalam buku Feny wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data melalui serangkaian pertanyaan yang diajukan dan direspon secara lisan (Fiantika, 2022). Jadi dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan baik telah disusun maupun secara langsung kepada seseorang untuk dimintai informasi terkait permasalahan relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Jenis wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu Wawancara mendalam (*in-depth interview*). *In-depth interview* atau wawancara mendalam adalah sebuah teknik pengumpulan data melibatkan percakapan tatap muka antara pewawancara dan informan (Murdiyanto, 2020). Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi mendalam dan bermakna tentang suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi

Salah satu metode pengumpulan yang tidak langsung ditunjukkan pada topik penelitian adalah dokumentasi. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi, seperti mencari makalah berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menemukan lebih banyak detail dan memperkuat kesimpulan pembahasan. Dokumen seperti buku harian seseorang, otobiografi, surat-surat dan catatan pribadi lainnya serta catatan resmi

seperti memo, catatan persidangan, korespondensi, dokumen kebijakan, proposal, arsip, hasil statistic dan lain sebagainya, dapat digunakan sebagai sumber informasi.

1.7.7. Teknik Analisis Data

Menurut Lexy J. Moleong dalam artikel Gifa, analisis data adalah kegiatan menelaah hasil penelitian meliputi proses menelaah seluruh data dari instrumen penelitian seperti catatan, dokumen, rekaman, dan lain-lain (Gifa Delyani Nursyafitri, 2021). Sedangkan menurut Taylor dalam artikel Gifa, analisis data adalah proses yang digunakan untuk menentukan tema dan juga merumuskan hipotesis (Gifa Delyani Nursyafitri, 2021).

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif diperkenalkan oleh Miles dan Huberman. Terdapat tiga alur model analisis data kualitatif yakni (Abdul, 2020):

1. Reduksi Data

Mengingat banyaknya data yang dikumpulkan di lapangan, sehingga perlu dicatat secara rinci dan teliti. Semakin banyak waktu dihabiskan oleh seorang peneliti di lapangan, maka jumlah data yang diperlukan akan semakin kompleks dan rumit. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih informasi paling penting, memfokuskan pada hal-hal penting dan mencari tema serta polanya.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk memperoleh data

selanjutnya. Reduksi data dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan seperti komputer, notebook dan lain sebagainya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, ketika melakukan penelitian, peneliti harus memperhatikan secara seksama apa saja yang dianggap aneh atau asing atau tidak memiliki pola.

2. Display Data (Penyajian Data)

Menyajikan data adalah langkah berikutnya setelah data tersebut direduksi. Pada penelitian kualitatif, data disajikan dengan menggunakan berbagai format seperti bagan, deskripsi singkat dan korelasi antar kategori. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Feny, pada penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dengan teks bersifat naratif (Fiantika, 2022). Dengan adanya penyajian data, maka dapat mempermudah dan memahami apa yang terjadi. Selain itu, Miles dan Huberman dalam buku Feny mengusulkan agar data dapat ditampilkan dengan menggunakan grafik, matriks, *network* (jejaring kerja), dan *chart* selain dengan teks yang bersifat naratif (Fiantika, 2022).

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Feny, penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah ketiga dalam analisis data penelitian kualitatif (Fiantika, 2022). Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan dapat dimodifikasi jika tidak ditemukan bukti substansial yang dapat mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun,

temuan pada tahap awal dianggap dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang dapat diandalkan dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data lebih lanjut.

1.7.8. Keabsahan dan Triangulasi Data

Peneliti dapat menggunakan triangulasi sebagai salah satu metode pengumpulan data untuk menentukan kredibilitas data yang telah mereka kumpulkan. Dengan kata lain, triangulasi mengacu pada proses verifikasi keakuratan data atau informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Triangulasi peneliti, triangulasi metodologis, triangulasi sumber/data dan triangulasi teoritis adalah berbagai bentuk triangulasi (Fiantika, 2022).

Pada penelitian ini, triangulasi yang akan digunakan yaitu triangulasi sumber data, yakni mengecek kebenaran data atau informasi dengan menggunakan berbagai jenis teknik pengumpulan dan sumber data seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.